



Dengan alat peraga sederhana, guru membantu murid memahami suku kata dengan cara yang menyenangkan.
(©Tim Komunikasi INOVASI)

Risalah Kebijakan

Mewujudkan Lingkungan Belajar Setara, Inklusif, dan Adaptif Perubahan Iklim di Kabupaten Maluku Tenggara

Mendorong Transformasi Sekolah Inklusif dan Tanggap Iklim di Kabupaten Maluku Tenggara: Strategi Mewujudkan Lingkungan Belajar yang Aman dan Setara



Capaian & situasi pembelajaran

Hasil Asesmen Nasional menunjukkan murid di Kabupaten Maluku Tenggara belum menguasai kemampuan dasar dengan baik. Hal ini turut dipengaruhi oleh kualitas lingkungan belajar yang belum sepenuhnya aman, nyaman, dan mendukung pemenuhan kebutuhan murid.



Faktor yang memengaruhi kualitas lingkungan belajar

Faktor-faktor yang memengaruhi kualitas lingkungan belajar murid di Kabupaten Maluku Tenggara meliputi masih adanya perundungan dan kekerasan di sekolah, praktik pendidikan yang belum maksimal mengakomodasi kebutuhan murid disabilitas, serta praktik mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang belum optimal melibatkan semua lapisan masyarakat.



Rekomendasi kebijakan

Penting bagi pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara untuk segera mengambil langkah nyata. Dari pemetaan situasi dan diskusi dengan pemangku kepentingan daerah, INOVASI memberikan beberapa rekomendasi kebijakan: (1) memperkuat sistem pencegahan dan penanganan kekerasan yang terpercaya dan responsif, (2) mendorong pemenuhan akomodasi yang layak bagi murid disabilitas, (3) memperluas akses bantuan sosial bagi murid dari keluarga miskin dan daerah terpencil, serta (4) menerapkan kebijakan dan program mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang lebih berdampak signifikan.

Hasil Asesmen Nasional menunjukkan skor literasi dan numerasi murid di Kabupaten Maluku Tenggara, Maluku (Kemendikbud, 2022) sebagai berikut:

Literasi : Laki-laki 42,99; perempuan 43,17

Numerasi : Laki-laki 31,89; perempuan 31,85

Skor literasi dan numerasi murid laki-laki tercatat kurang dari satu poin di bawah nilai rata-rata provinsi. Sementara, masing-masing skor murid perempuan lebih rendah sekitar dua poin dari nilai rata-rata provinsi.

Berdasarkan temuan riset, pelaksanaan, dan evaluasi program INOVASI, rendahnya hasil belajar dan perbedaan capaian murid turut dipengaruhi oleh kualitas lingkungan belajar. Sekolah dapat menjadi tempat dan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan mendukung jika memupuk dan menerapkan nilai-nilai kesetaraan gender, inklusi disabilitas dan sosial, serta aksi perubahan iklim. Di Kabupaten Maluku Tenggara, kesadaran, pengetahuan, dan praktik terkait isu-isu tersebut masih perlu diperkuat.

Temuan Utama

INOVASI telah melakukan pemetaan situasi kesetaraan gender, inklusi disabilitas dan sosial, serta perubahan iklim dengan para pemangku kepentingan daerah di Kabupaten Maluku Tenggara pada Mei 2025.

Dari pemetaan tersebut, faktor-faktor yang memengaruhi kualitas lingkungan belajar murid meliputi:



Kesetaraan gender

Rapor Pendidikan 2024 menunjukkan sebanyak 3-5 dari 10 murid merasa tidak aman dari perundungan (*bullying*), kekerasan fisik, dan kekerasan seksual di sekolah (Kemendikbud, 2024).

Perundungan dan kekerasan sering dilakukan oleh murid laki-laki. Guru pun memberikan hukuman verbal dan fisik pada murid. Salah satu penyebabnya, tradisi masih menormalisasi kekerasan sebagai bentuk hukuman atau tindakan disiplin pada anak. Selain itu, penggunaan media sosial tanpa pengawasan orang tua membuat anak dengan mudah meniru dan mempraktikkan apa yang mereka lihat. Kasus-kasus tersebut umumnya diselesaikan secara adat atau kekeluargaan untuk menghindari stigma sosial di masyarakat.



Inklusi disabilitas dan sosial

Dari 179 murid penyandang disabilitas (usia 5-18 tahun), sekitar 23% tidak sekolah dan 77% bersekolah. Mereka belajar di sekolah non-inklusi (20%), sekolah inklusi (11%), atau sekolah luar biasa/SLB (46%) (BPS & Kemendikbud, 2023). Namun, bagi mayoritas murid di kelompok ini, fasilitas di sekolah masih jauh dari memadai. Guru dan tenaga pendukung dengan kualifikasi khusus, untuk mendukung kebutuhan spesifik mereka, belum banyak tersedia. Stigma sosial tentang disabilitas pun terus berkembang di masyarakat, sehingga mereka seringkali dirundung dan dikucilkan.

Di sisi lain, masih banyak murid yang termarginalkan. Contohnya, murid dari keluarga miskin, murid di daerah terpencil, dan murid belum bisa berbahasa Indonesia.



Perubahan iklim

Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)¹ Kabupaten Maluku Tenggara mencapai 172,06 dari 250. Angka tersebut jauh di atas indeks Maluku (160,03) dan Indonesia (132,25) (BNPB, 2023). Menurut IRBI, gelombang ekstrem dan abrasi berisiko tinggi di kabupaten ini.

Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara telah menginisiasi berbagai kebijakan dan program mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, seperti Program Kampung Iklim (ProKlim) dan bank sampah. Sekolah pun sudah memperkenalkan dan membiasakan perilaku ramah lingkungan pada murid, yang salah satunya berasal dari kearifan lokal. Namun, keterbatasan pendanaan membuat langkah ini belum berjalan efektif dan melibatkan seluruh lapisan masyarakat.

¹ Penghitungan IRBI terdiri atas komponen bahaya (*hazard*, terkait fenomena alam), kerentanan (*vulnerability*, terkait kondisi fisik, sosial budaya, ekonomi, dan lingkungan), serta kapasitas (*capacity*, terkait unsur ketahanan kelembagaan daerah).

Ketiga faktor tersebut juga dipengaruhi oleh latar belakang ekonomi, sosial-budaya, dan geografis (interseksionalitas) berikut ini:



Hambatan majemuk

Kombinasi antara kemiskinan, keterpencilan, gender, dan disabilitas—misalnya, anak perempuan penyandang disabilitas yang tinggal di daerah terpencil—dapat meningkatkan risiko pengucilan dan hambatan untuk mengakses dan berpartisipasi dalam pendidikan.



Kekerasan dan gender

Anak perempuan rentan menjadi korban kekerasan seksual, sedangkan anak laki-laki sering terlibat dalam perundungan dan kekerasan fisik. Mekanisme perlindungan di sekolah yang lemah pun meningkatkan risiko tersebut.



Perubahan iklim di daerah terpencil

Bencana akibat perubahan iklim, seperti banjir dan kekeringan, mengganggu kegiatan belajar mengajar di sekolah yang terletak di kawasan pesisir dan kepulauan.



Dengan alat peraga sederhana, guru membantu murid memahami suku kata dengan cara yang menyenangkan.
(©Tim Komunikasi INOVASI)

Rekomendasi Kebijakan

Melihat temuan tersebut, penting bagi pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara untuk segera mengambil langkah nyata. Berdasarkan pemetaan situasi dan diskusi dengan pemangku kepentingan daerah, INOVASI memberikan beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan pemerintah. Kebijakan ini akan berkontribusi langsung pada peningkatan capaian belajar dan kesejahteraan murid.



Dinas Pendidikan: Memperkuat sistem pencegahan, pelaporan, dan penanganan kekerasan yang terpercaya, responsif, dan efektif

1. Membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di tingkat kabupaten dan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) di setiap sekolah. Satgas dan TPPK dapat mengadvokasi program pencegahan kekerasan (pendidikan karakter dan tindakan disiplin positif), mengawasi proses pelaporan dan penanganan kasus kekerasan, memfasilitasi layanan pendampingan yang dibutuhkan murid, serta menjamin pemenuhan hak pendidikan bagi murid yang terlibat.
2. Memperkuat penyelenggaraan Forum Anak di tingkat kabupaten. Forum ini dapat memperluas sosialisasi tentang hak-hak anak dan pencegahan kekerasan pada murid, guru, dan orang tua, sehingga mewujudkan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan mendukung.



Dinas Pendidikan & Dinas Sosial: Mendorong pemenuhan pelayanan dan akomodasi yang layak bagi murid penyandang disabilitas

1. Mengupayakan penerbitan surat keputusan (SK) bupati tentang penyelenggaraan sekolah inklusif—sesuai dengan Permendikbudristek Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang Layak (AYL) untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas. Regulasi ini dapat meningkatkan akses pendidikan dan penerimaan murid penyandang disabilitas di sekolah.
2. Mengumpulkan data terkait ragam, tingkat kesulitan, dan kebutuhan murid penyandang disabilitas secara berkala dan mengelolanya secara terpusat melalui *dashboard Profil Belajar Siswa (PBS)*, yang terintegrasi dengan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Selanjutnya, data disabilitas bisa menjadi landasan pembentukan kebijakan dan pemberian dukungan untuk memenuhi akomodasi murid, khususnya dalam pembelajaran di kelas.
3. Memperkuat kapasitas Unit Layanan Disabilitas (ULD) bidang pendidikan di tingkat kabupaten agar murid penyandang disabilitas bisa selalu mengakses sumber daya dan layanan yang dibutuhkan.
4. Bekerja sama dengan Dinas Kesehatan, lalu memperkuat koordinasi dan kolaborasi lintas sektor. Dengan begitu, penerapan kebijakan dan pemberian dukungan dapat selaras, komprehensif, dan tepat sasaran.
5. Melakukan sosialisasi program pendidikan inklusif, baik secara langsung ke sekolah dan masyarakat, melalui kerja sama dengan organisasi penyandang disabilitas, maupun melalui media digital. Sosialisasi ini bertujuan mengurangi stigma sosial dan risiko perundungan terhadap murid penyandang disabilitas.



Dinas Sosial: Memperluas akses program ke sejahteraan sosial dan bantuan ekonomi bagi murid dari keluarga miskin dan daerah terpencil

1. Melakukan sosialisasi program dan bantuan (seperti Program Keluarga Harapan dan Program Indonesia Pintar) secara langsung ke masyarakat, terutama bagi murid dari keluarga miskin dan daerah terpencil. Melalui sosialisasi ini, mereka dapat mengetahui dan segera mengakses bantuan pendidikan yang relevan.
2. Bekerja sama dengan sekolah dan organisasi masyarakat untuk mengoptimalkan jangkauan dan akses murid terhadap program dan bantuan pendidikan.



Dinas Pendidikan & Dinas Lingkungan Hidup: Menerapkan kebijakan dan program mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang lebih berdampak signifikan

1. Memastikan integrasi kearifan lokal terkait pelestarian alam dan lingkungan dalam kurikulum berjalan optimal. Integrasi ini dapat meningkatkan aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, sekaligus melestarikan tradisi dan budaya setempat.
2. Memperluas sosialisasi kebijakan dan program mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang telah berjalan (seperti ProKlim dan bank sampah), baik secara langsung ke masyarakat maupun melalui media digital. Dengan begitu, kebijakan dan program tersebut bisa dipahami masyarakat, kemudian meningkatkan kesadaran dan mengubah perilaku mereka.
3. Memperkuat kerja sama dan koordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk mensosialisasikan kesiapsiagaan bencana dan merancang skema evakuasi bencana di sekolah, juga meningkatkan respons terhadap bencana.
4. Mengalokasikan anggaran dana untuk program mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di sekolah, seperti Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB), agar dapat menjaga keamanan dan kenyamanan belajar murid.